



# JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Volume 14, Nomor 1, Maret 2020: i-xx

Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018

p-ISSN : 1978-2292 (print)

e-ISSN : 2579-7425 (online)

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, menetapkan bahwa Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

- Penasihat : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
- Pengarah : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum  
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM  
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
- Ketua Dewan Redaksi : Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.  
(*Editor*)
- Anggota Dewan Redaksi : 1. Edward James Sinaga, S.Si., M.H.  
2. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.  
3. Nizar Apriansyah, S.E., M.H.  
4. Trisapto Wahyudi Agung N, S.S., M.Si.  
5. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H.  
6. Haryono, S.Sos., M.H.  
7. Imam Lukito, S.T., M.H.  
8. Yusuf Saefudin, S.H., M.H.  
(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
- Redaksi Pelaksana : Fitriyani, S.H., M.Si.
- Sekretaris : 1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.  
2. Ibnu Prasetyo, S.H.
- Penyunting Tata Bahasa dan Naskah : 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.  
2. B. Lora Christyanti, S.IP.  
3. Amirah Balqis S.H.  
4. Ardyan Gilang Ramadhan S.Sos.  
5. Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P.  
(*Copyeditor*)
- Teknologi Sistem Informasi : 1. Machyudhie, S.T.  
2. Mochamad Arip, S.Kom.  
3. Harysandy Permana, S.Kom.  
4. Agus Priyatna, S.Kom.

## ***Alamat Redaksi:***

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954

ejournalkebijakan@gmail.com

HALAMAN KOSONG

KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI  
YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN

1. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jember

2. Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

3. Andry Indrady, Amd,Im., MPA., Ph.D.

Politeknik Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM RI

4. Prakoso Bhairawa Putera, S.I.P., MA.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

HALAMAN KOSONG

## DAFTAR ISI

### HASIL PENELITIAN (*ARTICLES*)

1. Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional  
Pembentukan Undang-Undang ..... 1 -18  
**Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri**
2. Penerjemah Tersumpah: Pengaturan dan Praktiknya ..... 19 - 42  
**Edward James Sinaga**
3. Evaluasi Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka  
terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi ..... 43 - 60  
**Trisapto Wahyudi Agung Nugroho**
4. Evaluasi Context, Input, Process, dan Product pada Pencapaian Kebijakan  
Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Brebes ..... 61 - 73  
**Ahmad Jazuli**
5. Hubungan Peneliti dan Analis Kebijakan dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan  
pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM ..... 75 - 90  
**Willy Wibowo**
6. Pola Penempatan Auditor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia RI .....91 - 110  
**Josephin Mareta**

### TINJAUAN HUKUM (*REVIEW*)

7. Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan  
Kejahatan Narkotika di Indonesia ..... 111 - 124  
**Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira, Sumarji**
8. Analisis Layanan Publik Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual ..... 125 - 140  
**Nizar Apriansyah**
9. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan  
dalam Revitalisasi Pemasyarakatan ..... 141 - 162  
**Dwi Elyana Susanti**
10. Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum  
melalui Skema Sertifikasi Profesi ..... 163 - 182  
**Sugeng, Dwi Atmoko**

HALAMAN KOSONG

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern. Eksistensi dan keberkaraan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Mulai Volume 14 Nomor 1, Maret 2020 ini, redaksi menambah jumlah artikel menjadi 10 per terbitan. Dalam edisi ini dimuat hasil-hasil penelitian dan tinjauan hukum dan hak asasi manusia, mulai dari kewarganegaraan, administrasi hukum umum, keimigrasian, peraturan perundang-undangan, pemasyarakatan, kekayaan intelektual, hingga pengawasan. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang diterima dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang tidak hanya ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM namun juga dari Institusi / Akademisi dari pelbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum dan hak asasi manusia yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

**Selamat Membaca,**

**REDAKSI**

HALAMAN KOSONG



Volume 14, Nomor 1, Maret 2020

p-ISSN: 1978-2292 (print)  
e-ISSN: 2579-7425 (online)

---

# **JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM**

---



BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMR.I

HALAMAN KOSONG

**The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.**

**Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri (The Coordinating Ministry for Economic Affairs)**

**Architecture of the Application of Omnibus Law Through National Legal Transplantation Formation of Law**

*Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 1, March 2020*

*The focus of the government in the field of regulation is to simplify various regulations and do some deregulation. Thus, the government views the Application of Omnibus Law to accelerate regulation simplification. The focus of this legal policy study is first how to model the architecture of the application of Omnibus Law in the National Law system, secondly how the concept of legal transplants Omnibus Law methods from the Common Law system to the Civil Law system. This purpose is to analyze and contribute to the basis and reference for legal interpretation regarding the architecture of the application of the Omnibus Law through the transplanting of national laws into law. This research method is a Non-Doctrinal Approach or socio-legal research with Qualitative methods. The specifications of the study are using analytical descriptive with the main types of data in this study are field data and supported by library data. The method of data analysis uses Juridical-Qualitative. The results of the research and discussion in this study is the progressive approach to legal interpretation, which is not limited to the text of the legislation regarding the formation of legislation, and other sector laws in the material Omnibus Law content through the architecture of the application of Omnibus Law can be achieved. The Omnibus Law legal transplantation process has been through the adjustment of national law before applied.*

**Keywords:** expansion of omnibus law; regulatory arrangement; legal transplantation.

**Edward James Sinaga (The Ministry of Law and Human Rights)**

**Sworn Translators: Regulation and Practices**

*Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 1, March 2020*

*Requests for appointment of sworn translator candidates at the Ministry of Law and Human Rights have increased. For this reason, the provisions become the basis for the technical appointment, monitoring, and dismissal of sworn translators. However, arrangements for sworn translator qualifications do not yet exist. Due to the large number of official documents requested by some destination countries which require them translating to local language, translators who genuinely understand or master the original language of the document are needed. As a professional translator must take responsibility for the results of their translation. Therefore, it needs to be a definite arrangement for sworn translators so that their position is clear and recognized by the community and can practice well. This research is an empirical legal research. Regulatory analysis related to the profession of sworn translator and practice using a qualitative approach. It is necessary to consider arrangements regarding the requirements of tertiary institutions that can carry out translator qualification exams and the need for special majors regarding sworn, official translators in each tertiary institution or fieldwork program to accommodate prospective official translator candidates.*

**Keywords:** sworn translators; translation; regulation.

**The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.**

**Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (The Ministry of Law and Human Rights)**

**Evaluation of Organizational Structure in Open Penitentiary to The Implementation of Tasks and Functions**

*Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 1, March 2020*

*The establishment of Open Penitentiary is to overcome the overcrowding problem in correctional institutions, which is an embodiment of the concept of community-based corrections, preparing prisoners for reintegration into the community (assimilation) But, in general, the existence of the Open Penitentiaries have not yet shown significant progress both in terms of fostering prisoners and the regulations on which they based on. The purpose of this research was to evaluate the implementation of tasks and functions using instruments as outlined in PermenPAN and RB Number 20 /2018 concerning Institutional Evaluation. It used a mix-method approach, namely quantitative and qualitative. The data was primary and secondary, the first was obtained from respondents and the latter was collected by literature research data, regulations, theories and other literature. The results concluded that the implementation of the duties and functions of the Open Penitentiary in terms of structure and process, the organization was effective (score 76.5). The organizational structures and processes can accommodate the internal needs of the organization and adapt to the dynamics of changing organizational external environments. However, it still has some minor weaknesses that can be overcome immediately by improvements through marginal routine actions.*

**Keywords:** *open penitentiary; community-based correction; evaluation.*

**Ahmad Jazuli (The Ministry of Law and Human Rights)**

**Evaluation of Context, Input, Process, and Product in Achievement of The Formation Policy of Brebes Immigration Office Working Units**

*Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 1, March 2020*

*Ministry of Law and Human Rights, c.q. The Directorate General of Immigration will increase the number of Immigration Offices or Immigration Office Working Units to strengthen immigration services throughout Indonesia. Data from the Directorate General of Immigration states that there is an increase in the number of passport applications from year to year. In 2015 there were 2,878,099 passport applications, and in 2016, the number of passport applications reached 3,032,000. Then in 2017, the number of applications increased to as many as 3,093,000. Increased passport applications due to changes in the behavior of the Indonesian people in traveling abroad, both for umrah, business, and work abroad. The establishment the Immigration Office as a Technical Implementation Unit that has not been evenly distributed in each district/city and even at the sub-district level has become a constraint in providing services to the community. This research conduct to analyze and evaluate the achievement of the policy of establishing the Brebes Immigration Office Work Union in the context of implementing the immigration function. With a descriptive approach to qualitative analysis, the results of this study state that the Brebes Office Work Unit has carried out immigration services following regulations and immigration service standards.*

**Keywords:** *immigration; evaluation; policy.*

**The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.**

**Willy Wibowo (The Ministry of Law and Human Rights)**

***The Relationship of The Researcher and Policy Analysis in The Making of Policy Recommendations in Legal and HAM Research and Development Agency***

*Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 1, March 2020*

*One of the ways to advance policies in the Ministry of Law and Human Rights environment is to strengthen the superior human resources in the technical policy field at the Law and Human Rights Research and Development Agency. Researchers and policy analysts have a strategic position in responding to these challenges. However, not many people know the role of policy analysts, tasks and functions in making policy recommendations, because this functional position is only in research and development institutions. This study aims to provide a comparative picture of the role of researchers and policy analysts in making policy recommendations, as well as looking at the gap of policy recommendations and the relationship between policy analysts and researchers at the Legal and Human Rights Research and Development Agency. This research uses a qualitative method with a comparative study approach. This study shows that researchers and policy analysts have different roles in making policy recommendations, differences are seen in terms of the main tasks and outputs. This research resulted in several recommendations to the Legal and Human Rights Research and Development Agency.*

**Keywords:** *researchers; policy analysts; recommendations.*

**Josephin Mareta (The Ministry of Law and Human Rights)**

***Auditor Placement System in The Regional Office of Ministry of Law and Human Rights***

*Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 1, March 2020*

*The burden of duties and supervisory functions carried out by the Inspectorate General is quite diverse and covers all Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights. This research was conducted to find the system of auditor placement in the Regional Office. This study uses qualitative research methods. Based on the results that there are two alternatives in the placement of auditors, First, the permanent placement of auditors and the second is the placement of auditors temporarily. Some aspects considered are organization regulations and work procedures of the Regional Office, regulations on auditor functional and human resources related to the availability of auditors, auditor qualifications, the period of placement and staff development. It is recommended to revise Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Regulation Number 30 Year 2018 concerning Organization and Work Procedure of the Ministry of Law and Human Rights Regional Office, analyze the level of risk and needs and supply of auditors in Regional Offices for permanent or temporary placement, and allocate auditor formation through the procurement of Candidates Civil Servants and in passing or transfer of positions by applicable regulations.*

**Keywords:** *placement system; auditor; regional office.*

**The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.**

**Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira, Sumarji (University of Pekalongan)**

***Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia***

*Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 1, March 2020*

*Integrated Assessment is a strategy to streamline the enforcement of criminal acts of narcotics by reducing demand through rehabilitation efforts for addicts and drug abusers. This paper aims to examine the mechanism of Integrated narcotics crime assessment in Indonesia. It also intends to explore whether Integrated Assessment as a new paradigm can reduce the demand for narcotics (reduced demand) or not. The problems examined in this study First, what is the mechanism for the Integrated Assessment of narcotics crimes in Indonesia? Second, is the Integrated Assessment able to reduce demand (address reduction) in overcoming cross-national narcotics crimes? The research method used in this study is normative juridical, with legal approaches, conceptual approaches, and historical approaches. Data sourced from primary legal materials and secondary legal materials obtained were analyzed using qualitative analysis. The results of the study indicate that integrated assessment is a mechanism formed based on joint regulations to place drug addicts and abusers into medical / social rehabilitation institutions. Integrated assessment provides a great opportunity for addicts and drug abusers to be rehabilitated. Rehabilitation is one way to reduce the demand for narcotics (reducing demand) which will have implications for reducing the level of drug trafficking in Indonesia.*

**Keywords:** *integrated assessment; demand reduction; drugs crime.*

**Nizar Apriansyah (The Ministry of Law and Human Rights)**

***Public Service Analysis Request for Intellectual Property Registration***

*Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 1, March 2020*

*Service user satisfaction is an indicator of the success of public service delivery, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services regulates how the government should implement service to the public. Registration requests for intellectual property held by the Ministry of Law and Human Rights Cq, the Directorate General of Intellectual Property, is expected to be an integrated service system that is easily accessible and timely in the settlement. So that it is following the principles of public service and ultimately is capable of supporting the nation's development through product quality products and are legally protected. However, many obstacles were found in excellent service implementation at a central and regional office level. So that efforts are needed to resolve the issue. This study considers that the process of completing applications for registration of intellectual property, which is often late becoming an issue that must be solved immediately.*

**Keywords:** *legal protection; public service; intellectual property.*

**The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.  
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.**

**Dwi Elyana Susanti (Class I Correctional Center of South Jakarta)**

**Optimization of the implementation Task of Correctional Adviser in A Correctional Revitalization**

*Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 1, March 2020*

*Correctional Adviser, which is a functional position, plays a role at all stages of the legal process. The pattern of coaching conducted on correctional fostered residents is determined from the results of research community counselors. This study uses a normative legal approach to explain various applicable laws and regulations relating to the Implementation of Community Guidance duties in revitalizing Correctional Facilities. The results showed the organizational structure of the Penitentiary did not yet have a Correctional Functional Position box. The Functional Position of Community Guidance requires special attention such as the fostering of functional functions of Community Guidance, position in the organizational structure, competence, and objectivity of assignment in support of penal revitalization. Once the importance of carrying out the duties of the Community Guidance must be supported by clarity of his position in the Penitentiary by completing the functional structure of the Community Guidance and simplifying the organizational structure, and the need to immediately establish a Penitentiary in the district /city.*

**Keyword:** *correctional adviser; implementation task; revitalization.*

**Sugeng, Dwi Atmoko (Bhayangkara University, Jakarta Raya)**

**Development Strategy of Legal Human Resources Through the Professional Certification Scheme**

*Scientific Journal of Law Policy, Volume 14, Number 1, March 2020*

*One of the challenges faced by legal development is the incompatibility of graduates of law higher education with the needs of industry and society. This is indicated by the large number of legal human resources who are unemployed, or work in inappropriate fields. This article aims to examines the importance of adjusting the legal science curriculum through the development of a professional certification scheme. The research method used is a normative juridical approach to the legislation, through selected documentation both print and electronic. The results showed that professional certification in legal tertiary institutions listed at BNSP was still limited, so that it was lagging behind other fields of science. The results of the study are expected to contribute to curriculum improvement to bridge the learning process and market needs.*

**Keywords:** *legal human resource; competence; certification scheme.*

**Kata Kunci bersumber dari Artikel  
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri (Kemenko Bidang Perekonomian)**

**Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020

Fokus pemerintah bidang regulasi adalah penyederhanaan berbagai regulasi dan melakukan beberapa deregulasi, atas dasar hal tersebut pemerintah memandang penerapan *omnibus law* dapat mempercepat penyederhanaan regulasi, fokus kajian kebijakan hukum ini adalah pertama bagaimana model arsitektur penerapan *omnibus law* dalam Sistem Hukum Nasional, kedua bagaimana konsepsi transplantasi hukum metode *omnibus law* dari *common law* sistem ke *civil law* sistem. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan kontribusi bagi basis dan acuan interpretasi hukum mengenai arsitektur penerapan *omnibus law* melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal atau *socio-legal research* dengan metode kualitatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data utama dalam penelitian ini data lapangan dan didukung data kepustakaan, metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian didapati hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan yang progresif penafsiran hukum tidak sebatas kepada bunyi teks undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan undang-undang sektor lainnya dalam materi muatan *omnibus law* melalui hal tersebut arsitektur penerapan *omnibus law* bisa tercapai, *Kedua* proses transplantasi hukum *omnibus law* telah melalui penyesuaian hukum nasional sebelum diterapkan.

**Kata kunci:** penerapan *omnibus law*; penataan regulasi; transplantasi hukum.

**Edward James Sinaga (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI)**

**Penerjemah Tersumpah: Pengaturan dan Praktiknya**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020

Permohonan pengangkatan calon penerjemah tersumpah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengalami peningkatan. Untuk menindaklanjuti hal ini telah diterbitkan ketentuan yang menjadi dasar dalam teknis pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah. Namun, pengaturan terhadap kualifikasi penerjemah tersumpah hingga saat ini belum ada. Sehubungan dengan banyaknya permintaan dokumen resmi yang diminta oleh sebagian negara tujuan yang mengharuskan untuk diterjemahkan dalam bahasa setempat, maka diperlukan penerjemah yang benar-benar memahami atau menguasai bahasa asal dari dokumen yang diterjemahkan. Secara profesi seorang penerjemah harus dapat bertanggung jawab terhadap hasil terjemahannya. Untuk itu perlu adanya suatu pengaturan yang jelas tentang penerjemah tersumpah sehingga kedudukannya menjadi jelas dan diakui oleh masyarakat serta dapat melakukan praktik dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Analisis pengaturan terkait profesi penerjemah tersumpah dan praktik penerjemah tersumpah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai syarat Perguruan Tinggi yang dapat melakukan ujian kualifikasi penerjemah dan perlu diadakannya jurusan yang khusus mengenai penerjemah resmi tersumpah di setiap Perguruan Tinggi atau program kuliah kerja lapangan, agar bisa mengakomodir para calon penerjemah resmi tersumpah.

**Kata kunci:** penerjemah tersumpah; penerjemahan; pengaturan.



**Kata Kunci bersumber dari Artikel  
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Trisapto Wahyudi Agung Nugroho (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI)**

**Evaluasi Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020

Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan yang merupakan perwujudan dari konsep *community-based corrections*, menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk reintegrasi ke masyarakat (asimilasi). Namun keberadaannya secara umumnya hingga saat ini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan baik dari segi pembinaan narapidana maupun peraturan yang menjadi landasannya. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menggunakan instrumen yang telah dituangkan pada PermenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (*mix-method*) yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari responden maupun data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang berupa, data penelitian, peraturan-perundangan, teori-teori dan literatur yang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dari sisi struktur dan proses, organisasi sudah efektif atau pada komposit P4 (skor 76,51). Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi, namun masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

**Kata kunci:** lembaga pemasyarakatan terbuka; *community-based correction*; evaluasi.

**Ahmad Jazuli (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI)**

**Evaluasi *Context, Input, Process*, dan *Product* pada Pencapaian Kebijakan Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Brebes**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020

Kementerian Hukum dan HAM, c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi akan memperbanyak jumlah kantor imigrasi atau unit kerja kantor imigrasi untuk memperkuat pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia. Data Direktorat Jenderal Imigrasi menyebutkan terdapat peningkatan jumlah permohonan paspor dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat 2.878.099 permohonan paspor dan pada 2016, jumlah permohonan paspor mencapai 3.032.000. Kemudian pada 2017 jumlah permohonan meningkat menjadi sebanyak 3.093.000. Meningkatnya permohonan paspor dikarenakan adanya perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk ibadah umrah, bisnis dan bekerja di luar negeri. Pembentukan kantor imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang belum merata di setiap kabupaten/kota dan bahkan di tingkat kecamatan sekalipun menjadi kendala tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi pencapaian kebijakan pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Brebes dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian. Dengan pendekatan deskriptif analisis kualitatif, hasil kajian ini menyatakan bahwa Unit Kerja Kantor Brebes telah melaksanakan layanan keimigrasian sesuai dengan regulasi dan standar layanan keimigrasian.

**Kata kunci:** imigrasi; evaluasi; kebijakan.

**Kata Kunci bersumber dari Artikel  
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Willy Wibowo (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI)**

**Hubungan Peneliti dan Analisis Kebijakan dalam Pembuatan Rekomendasi Kebijakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020

Untuk memajukan kebijakan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis riset salah satunya dengan memperkuat unsur sumber daya manusia unggul di bidang teknis kebijakan pada Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM. Peneliti dan analisis kebijakan memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Namun, belum banyak yang mengetahui peran analisis kebijakan, tugas dan fungsi dalam pembuatan rekomendasi kebijakan, karena jabatan fungsional ini baru di Lembaga penelitian dan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran perbandingan peran antara peneliti dan analisis kebijakan dalam pembuatan rekomendasi kebijakan, serta melihat *gap* rekomendasi kebijakan serta hubungan analisis kebijakan dengan peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti dan analisis kebijakan mempunyai peran yang berbeda dalam pembuatan rekomendasi kebijakan, perbedaan terlihat pada sisi tugas pokok dan *output*. Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

**Kata kunci:** peneliti; analisis kebijakan; rekomendasi.

**Josephin Mareta (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI)**

**Pola Penempatan Auditor di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020

Beban tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) cukup beragam serta mencakup seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sehingga penempatan auditor di Kantor Wilayah (Kanwil) merupakan suatu kebutuhan bagi Itjen dan Kanwil. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan pola penempatan auditor di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat dua pilihan pola penempatan auditor di Kanwil, yaitu pola penempatan auditor secara permanen, dan pola penempatan auditor secara sementara. Terkait dengan dua pola tersebut, terdapat aspek yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, peraturan, meliputi peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kanwil, peraturan tentang APIP, peraturan tentang jabatan fungsional auditor. Kedua, sumber daya manusia, berkaitan dengan ketersediaan auditor, kualifikasi auditor, jangka waktu penempatan dan pembinaan kepegawaian. Sehingga disarankan untuk merevisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, menganalisis tingkat risiko dan kebutuhan serta penyediaan auditor di Kanwil baik untuk ditempatkan secara permanen atau sementara, serta mengalokasikan formasi auditor melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan *Inpassing* atau perpindahan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** pola penempatan; auditor; kantor wilayah.

**Kata Kunci bersumber dari Artikel  
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira, Sumarji (Universitas Pekalongan)**

**Asesmen Terpadu: Penerapan *Restorative Justice* Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020

Untuk memajukan kebijakan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis riset salah satunya dengan memperkuat unsur sumber daya manusia unggul di bidang teknis kebijakan pada Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM. Peneliti dan analis kebijakan memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan tersebut. Namun, belum banyak yang mengetahui peran analis kebijakan, tugas dan fungsi dalam pembuatan rekomendasi kebijakan, karena jabatan fungsional ini baru di Lembaga penelitian dan pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran perbandingan peran antara peneliti dan analis kebijakan dalam pembuatan rekomendasi kebijakan, serta melihat *gap* rekomendasi kebijakan serta hubungan analis kebijakan dengan peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peneliti dan analis kebijakan mempunyai peran yang berbeda dalam pembuatan rekomendasi kebijakan, perbedaan terlihat pada sisi tugas pokok dan *output*. Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

**Kata kunci:** peneliti; analis kebijakan; rekomendasi.

**Nizar Apriansyah (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI)**

**Analisis Layanan Publik Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020

Kepuasan pengguna layanan merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan layanan publik, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur bagaimana seharusnya pemerintah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan menjadi sistem pelayanan yang terintegrasi mudah diakses dan tepat waktu dalam penyelesaian, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip layanan publik dan pada akhirnya mampu mendukung pembangunan bangsa melalui produk-produk yang berkualitas dan terlindungi secara hukum, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan prima baik di tingkat pusat maupun pada tataran kantor wilayah sehingga perlu upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kajian ini menganggap bahwa proses penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang sering terlambat menjadi suatu persoalan yang segera harus diselesaikan.

**Kata kunci:** perlindungan hukum; pelayanan publik; kekayaan intelektual.

**Kata Kunci bersumber dari Artikel  
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

**Dwi Elyana Susanti (Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan)**

**Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Revitalisasi Pemasarakatan**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020

Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan jabatan fungsional berperan pada seluruh tahapan proses hukum. Pola pembinaan yang dilakukan pada warga binaan pemasarakatan ditentukan dari hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam merevitalisasi Pemasarakatan. Hasil penelitian menunjukkan struktur organisasi Balai Pemasarakatan belum ada kotak Jabatan Fungsional Pemasarakatan. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan perhatian khusus seperti pembinaan pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, kedudukan dalam struktur organisasi, kompetensi, dan objektivitas pemberian tugas dalam mendukung revitalisasi pemasarakatan. Begitu pentingnya pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan harus didukung dengan kejelasan kedudukannya di Balai Pemasarakatan dengan melengkapi struktur jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan serta menyederhanakan struktur organisasi, serta perlu segera membangun Balai Pemasarakatan di kabupaten/kota.

**kata kunci:** pembimbing kemasyarakatan; pelaksanaan tugas; revitalisasi.

**Sugeng, Dwi Atmoko (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)**

**Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi**

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 1, Maret 2020

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pembangunan bidang hukum adalah tidak sesuainya kompetensi lulusan pendidikan tinggi hukum dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat. Hal tersebut ditandai oleh masih banyaknya sumber daya manusia hukum yang menganggur, atau bekerja di bidang yang tidak sesuai. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya melakukan pembaruan kurikulum ilmu hukum melalui pengembangan skema sertifikasi profesi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumenter dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui dokumentasi terpilih baik cetak maupun elektronik. Hasil penelitian menunjukkan, sertifikasi profesi di lembaga pendidikan tinggi hukum yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi masih terbatas ruang lingkupnya, sehingga tertinggal dibandingkan bidang ilmu lain. Untuk itu perlu dikembangkan skema sertifikasi baru sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kurikulum untuk menjembatani proses pembelajaran dengan kebutuhan pengguna jasa.

**Kata kunci:** sumber daya manusia hukum; kompetensi; skema sertifikasi.